

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Multikolinieritas dan uji Heteroskedastisitas.

1. Uji Multikolinieritas

Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier, oleh karena itu pada model data panel perlu memenuhi syarat terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar (*asumsi klasik*). Meskipun demikian, adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas dalam pembentukan sebuah model (persamaan) sangatlah tidak dianjurkan terjadi, karena hal itu akan berdampak kepada keakuratan pendugaan parameter, dalam hal ini koefisien regresi, dalam memperkirakan nilai yang sebenarnya. Korelasi yang kuat antara variabel bebas dinamakan multikolinieritas.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini, disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas. Dimana koefisien korelasi variabel independen berada dibawah 0,85, sehingga model ini termasuk model yang bagus karena tidak terdapat korelasi antara variabel independennya atau dengan kata lain dalam model ini tidak terdapat multikolinieritas. Syarat model yang baik adalah model yang bebas dari multikolinieritas.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya konstan. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data *cross section*. Dikarenakan regresi data panel memiliki karakteristik tersebut, maka ada kemungkinan terjadi heteroskedastisitas. Dari ketiga model regresi data panel hanya *Common Effect* dan *Fixed Effect* saja yang memungkinkan terjadinya heteroskedastisitas, sedangkan pada model *Random Effect* tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan estimasi *Common Effect* dan *Fixed Effect* masih menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) sedangkan *Random Effect* sudah menggunakan Generalize Least Square (GLS) yang merupakan salah satu teknik penyembuhan regresi.

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 5.1

Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.394366	0.200829	-1.963694	0.0548
AMH?	0.002651	0.001253	2.115831	0.0391
LOG(JA?)	-0.009445	0.013760	-0.686370	0.4955
LOG(GDP?)	0.030763	0.027211	1.130549	0.2633

Sumber : Data Diolah, 2016

Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data *cross section*. Dikarenakan regresi data panel memiliki karakteristik *cross section* dan *timeseries*, maka ada kemungkinan terjadi heteroskedastisitas. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dua nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan satu nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat heteroskedastisitas.

B. Hasil Penelitian

1. Pemilihan Model Analisis

Regresi data panel memberikan alternatif model yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Model *common effect* dan *fixed effect* menggunakan pendekatan OLS (*Ordinary Least Squared*) dalam teknik estimasinya, sedangkan *random effect* menggunakan GLS (*Generalized Least Squares*) sebagai teknik estimasinya. Ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. Pertama, uji statistik F atau Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode *commom effect* atau metode *fixed effect*. Kedua, Uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode *fixed effect* atau metode *random effect*. Ketiga, uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara metode *Commom Effect* atau metode *Random Effect*. Sementara itu Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Squared*) meliputi uji Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas.

a. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk memilih antar model *Common Effect (Pooled Square)* atau *Fixed Effect*. Jika hasilnya menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik yang digunakan adalah model *common effect*. Akan tetapi jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect*, dan pengajuan akan berlanjut ke *uji hausman*.

Hasil uji chow dapat dilihat pada perhitungan dengan nilai tabel berikut ini:

TABEL 5.2

Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
S Cross-section F	43,801121	(7,53)	0.0000

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross-section F sebesar 0,0000 yang nilainya $< 0,05$ sehingga menolak hipotesis nol. Dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan dalam penelitian ini dibanding dengan model *common effect*.

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect* sebagai model yang akan digunakan dalam penelitian. Jika dari hasil *Uji Hausman* tersebut menyatakan menerima hipotesis nol, maka model

terbaik yang digunakan adalah model *Random Effect*. Tetapi jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

TABEL 5.3

Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21,844115	3	0.0001

Sumber : Data diolah, 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai probabilitas cross section random. Apabila nilainya $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah *random effect*, tapi apabila nilainya $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *fixed effect*. Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai prob. cross-section random sebesar 0,0001 yang mana nilainya $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *random effect* digunakan dalam penelitian ini.

C. Analisis Model Data Panel

Berdasarkan pemilihan model yang terbaik yang telah dilakukan sebelumnya, maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect*. Selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut ini :

TABEL 5.4

Hasil estimasi model

Variabel dependen: IKI	Model		
	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
Konstanta	-1.875831	-3.075749	-1.875831
Standar error	0.219909	0.356900	0.219909
T-statistic	-8.530032	-8.617957	-8.530032
Probabilitas	0.0000	0.0000	0.0000
Angka Melek Huruf	-0.019153	0.005153	0.002844
Standar error	0.001543	0.002227	0.002108
T-statistic	-12.40903	2.314486	1.349244
Probabilitas	0.0000	0.0245	0.1823
Jalan Aspal	0.043328	0.009812	0.040520
Standar error	0.007115	0.024454	0.012173
T-statistic	6.090130	0.401256	3.328826
Probabilitas	0.0000	0.6898	0.0015
GDP percapita	0.206162	0.342384	0.190397
Standar error	0.010368	0.048358	0.017684
T-statistic	19.88419	7.080242	10.76645
Probabilitas	0.0000	0.0000	0.0000
R²	0.889410	0.989045	0.662618
F-Statistic	28.07887	478.4780	39.27990
Prob (F-Stat)	0.000000	0.000000	0.000000
Durbin-Watson Stat	0.237054	1.107349	0.603867

Sumber : Data Diolah, 2016

D. Hasil Estimasi Model Regresi Panel

Setelah melakukan pengujian statistik untuk menentukan model mana yang akan dipilih dalam penelitian, maka disimpulkan bahwa model *fixedeffect* yang

akan digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan model data panel yang hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data negara sama dalam berbagai kurun waktu.

Berikut disajikan tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 8 negara selama periode 2008-2015 :

TABEL 5.5

Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel dependen: IKI	Model
	FixedEffect
Konstanta	-3.075749
Standar error	0.356900
T-statistic	-8.617957
Probabilitas	0.0000
Angka Melek Huruf	0.005153
Standar error	0.002227
T-statistic	2.314486
Probabilitas	0.0245
Jalan Aspal	0.009812
Standar error	0.024454
T-statistic	0.401256
Probabilitas	0.6898
GDP percapita	0.342384
Standar error	0.048358
T-statistic	7.080242
Probabilitas	0.0000
R²	0.989045
F-Statistic	478.4780
Prob (F-Stat)	0.000000
Durbin-Watson Stat	1.107349

Sumber : Data Diolah, 2016

Dari hasil estimasi di atas, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi indeks keuangan inklusif pada setiap negara di ASEAN yang diinterpretasikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{IIK_INDONESIA} &= 0.0194224701045 \text{ (Efek wilayah)} - 3.07574864764 \\
 &+ 0.00515323984943 * \text{AMH_INDONESIA} + \\
 &0.00981223763497 * \text{LOG(JA_INDONESIA)} + \\
 &0.342383648994 * \text{LOG(GDP_INDONESIA)} \\
 \\
 \text{IIK_MALAYSIA} &= 0.0258977263437 - 3.07574864764 + \\
 &0.00515323984943 * \text{AMH_MALAYSIA} + \\
 &0.00981223763497 * \text{LOG(JA_MALAYSIA)} + \\
 &0.342383648994 * \text{LOG(GDP_MALAYSIA)} \\
 \\
 \text{IIK_FILIPINA} &= 0.110827758988 - 3.07574864764 + \\
 &0.00515323984943 * \text{AMH_FILIPINA} + \\
 &0.00981223763497 * \text{LOG(JA_FILIPINA)} + \\
 &0.342383648994 * \text{LOG(GDP_FILIPINA)} \\
 \\
 \text{IIK_THAILAND} &= 0.0516071458755 - 3.07574864764 + \\
 &0.00515323984943 * \text{AMH_THAILAND} + \\
 &0.00981223763497 * \text{LOG(JA_THAILAND)} + \\
 &0.342383648994 * \text{LOG(GDP_THAILAND)} \\
 \\
 \text{IIK_BRUNEI} &= -0.403349004256 - 3.07574864764 + \\
 &0.00515323984943 * \text{AMH_BRUNEI} + \\
 &0.00981223763497 * \text{LOG(JA_BRUNEI)} + \\
 &0.342383648994 * \text{LOG(GDP_BRUNEI)} \\
 \\
 \text{IIK_KAMBOJA} &= 0.456316064485 - 3.07574864764 + \\
 &0.00515323984943 * \text{AMH_KAMBOJA} + \\
 &0.00981223763497 * \text{LOG(JA_KAMBOJA)} + \\
 &0.342383648994 * \text{LOG(GDP_KAMBOJA)} \\
 \\
 \text{IIK_SINGAPURA} &= -0.481690674075 - 3.07574864764 + \\
 &0.00515323984943 * \text{AMH_SINGAPURA} + \\
 &0.00981223763497 * \text{LOG(JA_SINGAPURA)} + \\
 &0.342383648994 * \text{LOG(GDP_SINGAPURA)} \\
 \\
 \text{IIK_MYANMAR} &= 0.220968512534 - 3.07574864764 +
 \end{aligned}$$

$$0.00515323984943*AMH_MYANMAR + \\ 0.00981223763497*LOG(JA_MYANMAR) + \\ 0.342383648994*LOG(GDP_MYANMAR)$$

Dari hasil interpretasi diatas dapat diketahui bahwa negara yang memberikan efek paling besar terhadap keuangan inklusif di ASEAN adalah Negara Kambojasebesar 0.456316064485, kemudian disusul Negara Myanmardengan memberikan efek sebesar 0.220968512534 terhadap keuangan inklusif di ASEAN. Negara Filipina memberikan efek sebesar 0.110827758988.Negara Thailand memberikan efek 0.0516071458755, Negara Malaysia memberikan efek 0.0258977263437, dan Indonesia memberikan efek sebesar 0.0194224701045.Sedangkan dua negara memberikan efekyang negatif terhadap keuangan inklusif di ASEAN, dimana Negara Singapura memberikan efek sebesar -0.481690674075, dan Negara Brunei memberikan efek sebesar -0.403349004256.

E. Uji Statistik

Uji statitik dalam penelitian ini meliputi ujit-statistik (uji signifikan parameter individual), uji F-statistik (uji signifikasi bersama-sama) dan koefisien determinasi (R square).

1. Uji t-statistik

Uji t-statistik bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.Berikut disajikan tabel uji t-statistik Angka Melek Huruf, Infrastruktur

(Jalan Aspal) dan GDP Per kapita terhadap keuangan inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN.

TABEL 5.6

Hasil Uji t-Statistik

Variabel	Koefisien Regresi	Prob	Standar Prob.
AMH	0.005153	0.0245	0.05
LOG(JA)	0.009812	0.6898	0.05
LOG(GDP)	0.342384	0.0000	0.05

Sumber : Data Diolah,2016

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa koefisien regresi untuk variabel AMH (Angka Melek Huruf) sebesar 0.005153 dengan probabilitas sebesar 0.0245 yang signifikan pada taraf nyata 5 persen. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa variabel AMH berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN.

Hasil uji t-statistik untuk variabel JA (Jalan Aspal) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0.009812 dengan probabilitas sebesar 0.6898 dan tidak signifikan pada taraf 5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur jalan aspal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keuangan inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN. Sementara itu, untuk variabel GDP Per kapita memiliki koefisien regresi positif sebesar 0.342384 yang signifikan pada taraf 5 persen dengan probabilitas sebesar 0.0000.

2. Uji F-statistik

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect* dimana dalam estimasi model (tabel *fixed effect*) nilai probabilitas F-statistik yang ditunjukkan model ini adalah sebesar 0.000000. Hal ini berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, dengan kata lain Angka Melek Huruf, Infrastruktur (Jalan Aspal) dan GDP Per kapita secara bersama-sama mempengaruhi Keuangan Inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN.

3. Koefisien Determinasi

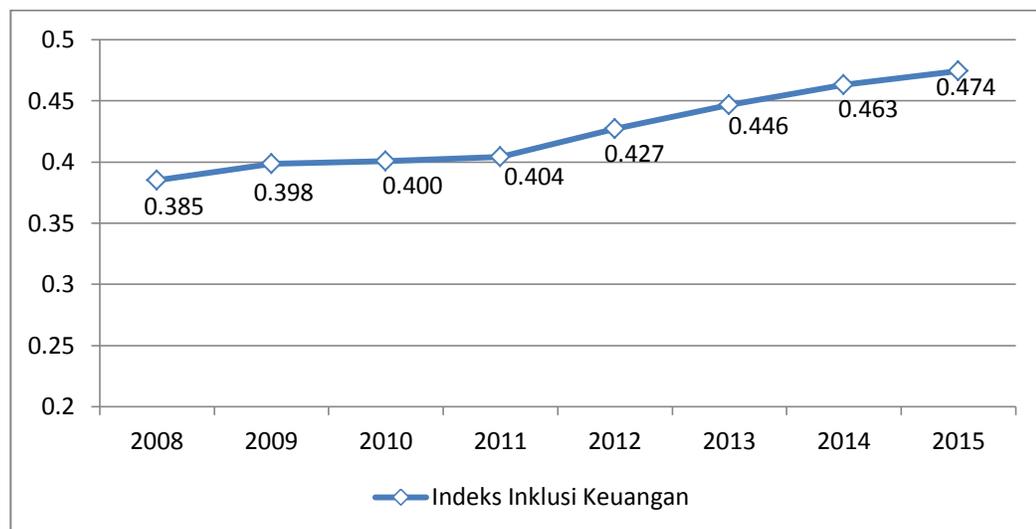
Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan himpunan variasi variabel dependen. Dari hasil estimasi model (tabel *fixed Effect*) dapat diketahui bahwa nilai *R squared* sebesar 0.989045. Hal ini menandakan bahwa model ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 98,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 1,1 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

F. Pembahasan

1. Tingkat Keuangan Inklusif Antar Negara

Indeks keuangan inklusif dibentuk oleh 3 dimensi yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan jasa perbankan. Nilai indeks keuangan inklusif dari delapan negara yang terdapat di ASEAN dari tahun 2008

sampai dengan 2015 menunjukkan angka 0,4 dan tergolong sedang, meskipun terdapat satu negara yang nilainya $\geq 0,7$ yaitu Negara Singapura. Pada umumnya nilai indeks keuangan inklusif dari tahun 2008-2015 selalu mengalami peningkatan tetapi peningkatan nilai indeks tidak begitu signifikan. Pada tahun 2008 nilai indeks keuangan inklusif di ASEAN mencapai 0,385 dan menjadi 0,474 pada tahun 2015.



Sumber : Data Diolah, 2016

GAMBAR 5.1

Indeks Keuangan Inkusi di ASEAN tahun 2008-2015

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, indeks keuangan inklusif di ASEAN mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Peningkatan indeks keuangan inklusif tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan inklusifitas jasa perbankan di ASEAN.

Adanya peningkatan keuangan inklusif di ASEAN, khususnya jasa perbankan, dikarenakan adanya peningkatan dari setiap dimensi keuangan inklusif yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan perbankan, dan penggunaan jasa perbankan di ASEAN. Peningkatan ini juga menggambarkan bahwa akses dan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat, khususnya bank umum konvensional, mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan semakin berkembangnya sektor perbankan di ASEAN.

TABEL 5.7

Nilai Dimensi Indeks Keuangan Inklusif di ASEAN tahun 2008-2015

Tahun	Dimensi Keuangan Inklusif		
	Penetrasi Perbankan	Ketersediaan Perbankan	Penggunaan Jasa Perbankan
2008	0.423	0.395	0.348
2009	0.426	0.409	0.372
2010	0.446	0.411	0.359
2011	0.455	0.415	0.36
2012	0.485	0.421	0.398
2013	0.513	0.435	0.423
2014	0.504	0.473	0.435
2015	0.505	0.477	0.462

Sumber : Data Diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan nilai setiap dimensi yang dicapai oleh ASEAN. Mengadopsi dari penelitian Sarma (2012), dalam penelitian ini, masing-masing dimensi dibagi kedalam 3 kategori, yaitu tinggi ($0,6 < d \leq 1$), sedang ($0,3 \leq d \leq$

0,6), dan rendah ($< 0,3$). Ketiga dimensi menunjukkan dalam kategori sedang. Dari data di atas dapat diketahui bahwa dimensi penggunaan jasa perbankan di ASEAN paling kecil jika dibandingkan dengan dimensi penetrasi dan ketersediaan jasa perbankan, yaitu dengan rata-rata sebesar 0,394. Dimensi ketersediaan jasa perbankan tergolong sedang, dengan indikasi jumlah kantor cabang yang ada di ASEAN pada tahun 2015 mencapai 88,86 unit per 100.000 populasi dewasa tetapi jumlah kantor cabang yang telah ada ini belum mampu melayani seluruh masyarakat di ASEAN. Dimensi penetrasi perbankan di ASEAN juga tergolong sedang karena nilai dimensi ini berkisar antara 0,469. Hal ini berarti meskipun jumlah rekening deposit di ASEAN mencapai 340 juta unit, orang yang mengakses jasa perbankan di ASEAN masih rendah. Sama halnya dengan dimensi penetrasi dan ketersediaan, dimensi penggunaan juga tergolong dalam kategori sedang. Meskipun terjadi peningkatan yang relatif lebih besar dari tahun 2008 sebesar 0,34 menjadi 0,46 pada tahun 2015. Peningkatan pada dimensi penggunaan ini menunjukkan adanya peningkatan pada volume tabungan yang dihimpun bank umum konvensional di ASEAN.

Dimensi ketersediaan perbankan lebih rendah dibandingkan dengan dimensi penetrasi perbankan. Hal ini menandakan bahwa, jumlah kantor cabang bank umum konvensional relatif lebih sedikit tetapi jumlah orang yang memiliki rekening lebih banyak. Rendahnya dimensi ketersediaan dapat disebabkan oleh kondisi geografis dan demografis ASEAN yang cenderung daerah yang

dikelilingi perbukitan, namun padat penduduk. Selain itu faktor imigran yang terjadi di ASEAN juga cenderung tinggi dimana setiap tahun mendapatkan sumbangan yang tidak sedikit dari seluruh imigran di ASEAN. Kondisi ini merupakan salah satu efek dari dikeluarkannya kebijakan SDGs yang mulai berlaku di akhir tahun 2015. Para imigran juga membutuhkan layanan jasa keuangan, Namun hal tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan kantor pelayanan jasa keuangan. Menurut Ummah (2015) rendahnya penetrasi perbankan dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Pertama, meskipun perbankan memiliki banyak nasabah, namun melakukan transaksi dengan volume yang relatif kecil. Besarnya transaksi dapat dilihat pada dimensi ketiga yaitu dimensi penggunaan. Kedua, pemberian bobot yang sama dalam perhitungan indeks dimensi. Penetrasi perbankan seharusnya diberi bobot yang lebih besar dibanding dengan dimensi lainnya. Hal ini karena jumlah pengguna perbankan merupakan indikator penting dari jasa keuangan yang inklusif. Jasa keuangan akan semakin inklusif apabila penggunaan jasa keuangan tersebut semakin banyak.

a. Penetrasi Perbankan

Dimensi pertama dari keuangan inklusif adalah penetrasi perbankan yang menggambarkan banyaknya pengguna jasa perbankan. Jasa keuangan semakin inklusif jika penggunaan jasa keuangan semakin banyak (Ummah, 2015). Salah satu ukuran dari dimensi ini jumlah rekening deposit yang ada diperbankan. Perhitungan dimensi penetrasi perbankan dalam penelitian ini digambarkan

dengan jumlah rekening deposit yang terdapat di bank umum konvensional di ASEAN.

TABEL 5.8

Dimensi Penetrasi Tingkat Negara di ASEAN tahun 2008-2015

NEGARA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
INDONESIA	0.1943	0.203	0.2358	0.252	0.2808	0.3466	0.3637	0.3769	0.282
MALAYSIA	0.8535	0.8493	0.8695	0.8938	0.9332	1	0.9963	0.9321	0.916
FILIPINA	0.1642	0.1704	0.1979	0.2176	0.1972	0.2103	0.2141	0.2257	0.200
THAILAND	0.5671	0.567	0.5834	0.5634	0.5894	0.6014	0.611	0.6202	0.588
BRUNEI	0.6895	0.697	0.7306	0.7403	0.88	0.9159	0.7789	0.7853	0.777
KAMBOJA	0.0303	0.0391	0.0444	0.0522	0.06	0.0696	0.0872	0.1003	0.060
SINGAPURA	0.8338	0.8351	0.8566	0.8713	0.8809	0.896	0.909	0.9121	0.874
MYANMAR	0.0486	0.0496	0.0511	0.0481	0.0562	0.0613	0.0694	0.0878	0.059

Sumber : Data diolah, 2016

Dari data diatas dapat diketahui bahwa, empat negara di ASEAN memiliki dimensi penetrasi perbankan tinggi dan sisanya tergolong sedang. Penetrasi perbankan yang paling tinggi terdapat di Negara Malaysia digolongkan ke dalam kategori tinggi, yaitu berkisar antara 0,8-1 pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Jumlah rekening di Negara Malaysiapaling tinggi mencapai 50.917.397 unit pada tahun 2014, meningkat sebesar 12.366.908 unit dari tahun 2008 yang berjumlah 38.550.489 unit. Adanya peningkatan jumlah rekening di perbankan menunjukkan pengguna jasa bank umum konvensional di Negara Malaysia semakin meningkat.Selain jumlah pengguna jasa perbankan yang semakin banyak, peningkatan ini juga dapat disebabkan oleh individu yang awalnya hanya memiliki satu rekening menjadi lebih dari satu rekening.

Tingginya penetrasi perbankan di Negara Malaysia disebabkan oleh aktivitas perekonomian di Malaysia yang juga tinggi karena wilayahnya yang tidak terlalu luas menjadi perekonomian terpusat. Selanjutnya Negara Singapura dan Brunei memiliki penetrasi perbankan yang lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Negara Thailand dan Indonesia memiliki jumlah rekening yang terbilang kecil namun diimbangi dengan jumlah penduduk dewasa yang juga kecil sehingga perhitungan penetrasi cukup besar. Sementara itu, Negara Filipina juga memiliki penetrasi perbankan yang rendah. Populasi yang tinggi salah satu penyebab rendahnya dimensi penetrasi bila tidak diikuti dengan jumlah depositor yang tinggi pula. Hal demikian terjadi di Negara Kamboja yang memiliki jumlah penduduk dewasa yang tinggi namun tidak diimbangi dengan dimensi penetrasi perbankan yang tinggi. Nilai dimensi penetrasi paling rendah diperoleh oleh Negara Myanmar yang berkisar antara 0,0486-0,059 dari tahun 2008 sampai tahun 2015.

b. Ketersediaan

Dimensi kedua dari keuangan inklusif adalah ketersediaan jasa perbankan. Keberadaan jasa perbankan merupakan hal yang penting dalam keuangan yang inklusif. Indikator yang digunakan untuk dimensi ini adalah jumlah kantor cabang bank umum konvensional. Tersedianya kantor cabang perbankan yang dapat dijangkau oleh masyarakat menunjukkan penyebaran jasa

perbankan. Semakin banyak dan semakin luas penyebaran kantor cabang perbankan, maka layanan jasa perbankan yang diberikan semakin tinggi.

TABEL 5.9

Dimensi Ketersediaan Jasa Perbankan di ASEAN Tahun 2008-2015

NEGARA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
INDONESIA	0.2881	0.3345	0.3551	0.3663	0.4049	0.4444	0.7699	0.7626	0.4657
MALAYSIA	0.4805	0.4745	0.4659	0.4809	0.4775	0.4684	0.462	0.4577	0.4709
FILIPINA	0.3302	0.3285	0.3323	0.3306	0.3426	0.3564	0.3727	0.3796	0.3466
THAILAND	0.4483	0.4693	0.4792	0.4903	0.5054	0.523	0.5414	0.5419	0.4998
BRUNEI	0.9772	1	0.9785	0.9708	0.9506	0.9601	0.8476	0.8708	0.9445
KAMBOJA	0.1314	0.1657	0.1722	0.1829	0.1919	0.2044	0.2435	0.2619	0.1942
SINGAPURA	0.444	0.4397	0.4388	0.4281	0.4195	0.4083	0.4032	0.4006	0.4228
MYANMAR	0.0614	0.0623	0.064	0.0704	0.0777	0.1146	0.1421	0.1404	0.0916

Sumber : Data Diolah, 2016

Keberadaan kantor cabang bank umum terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari data diatas dapat dilihat bahwa dimensi ketersediaan jasa perbankan di ASEAN yang paling tinggi dimiliki oleh Negara Brunei yang berkisar antara 0,8-1 pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Sementara itu, Negara dengan dimensi ketersediaan paling rendah diperoleh oleh Negara Myanmar dengan angka hanya berkisar 0,0614-0,1404 pada kurun waktu delapan tahun. Jumlah kantor cabang suatu negara berkaitan dengan jumlah pengguna jasa perbankan. Jumlah jasa perbankan harus mudah dijangkau oleh para pengguna. Namun banyaknya kantor cabang belum cukup untuk menggambarkan luas penyebaran layanan perbankan. Oleh karena itu, untuk mengetahui berapa banyak individu yang dapat dijangkau oleh perbankan, jumlah kantor cabang yang ada dibagi

dengan jumlah populasi dewasa. Setelah dibandingkan dengan jumlah populasi dewasa, banyaknya jumlah kantor cabang belum cukup menjamin perbankan dapat menjangkau masyarakat. Semakin banyak populasi dewasa suatu negara, semakin banyak pula kantor cabang yang dibutuhkan agar dapat melayani pengguna jasa perbankan.

Negara ASEAN memiliki dimensi ketersediaan yang tergolong sedang yakni ($0,3 \leq d \leq 0,6$), sedangkan satu-satunya yang memiliki nilai dimensi ketersediaan yang tinggi adalah Negara Brunei dengan nilai dimensi $> 0,6$. Meskipun demikian, dimensi ketersediaan di beberapa negara menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Artinya, hal ini mengindikasikan peningkatan dalam fasilitas fisik perbankan untuk menjangkau masyarakat.

c. Penggunaan Jasa Perbankan

Penggunaan dari jasa perbankan merupakan dimensi ketiga dari keuangan inklusif. Banyak orang yang memiliki akses terhadap jasa perbankan tetapi tidak menggunakan jasa tersebut dikarenakan berbagai alasan seperti jarak yang cukup jauh untuk menjangkau layanan keuangan formal, produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan, atau memiliki pengalaman yang buruk dengan penyedia jasa keuangan. Sehingga kepemilikan rekening saja tidak cukup untuk menggambarkan keinklusifan sistem keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi ini adalah jumlah tabungan dan kredit yang disalurkan oleh perbankan. Simpanan dan pinjaman merupakan jasa yang mendasar dari setiap

perbankan. Negara yang memiliki dimensi kegunaan paling tinggi yaitu Negara Singapura dengan nilai dimensi menyentuh angka 1 sementara negara lainnya tergolong sedang dan rendah.

d. Indeks Keuangan Inklusif antar Negara

Rendahnya tingkat keuangan inklusif di ASEAN dapat disebabkan oleh banyaknya penduduk yang tidak dapat mengakses layanan jasa perbankan. Masyarakat tidak dapat mengakses perbankan karena adanya hambatan geografis beberapa Negara ASEAN yang merupakan daerah dengan kondisi perbukitan atau tidak rata sehingga biaya pendirian kantor cabang mahal. Selain itu, persyaratan yang ketat, proses yang kompleks, dan formalitas yang tinggi menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses perbankan (Ummah, 2015).

Berdasarkan nilai rata-rata indeks keuangan inklusif delapan negara di ASEAN memiliki kategori keuangan inklusif yang tergolong sedang. Dua negara yang tergolong tinggi, yaitu Singapura dan Malaysia dengan rata-rata indeks keuangan inklusif mencapai 0,705 dan 0,688. Hal ini karena persebaran pada dimensi penetrasi memiliki nilai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Akibatnya tingkat keuangan inklusif semua negara terlihat jauh lebih buruk.

Rendahnya indeks keuangan inklusif menunjukkan penyebaran dan pemanfaatan jasa perbankan masih rendah (Ummah, 2015). Perbedaan indeks

keuangan inklusif antar negara di ASEAN menunjukkan masih terjadinya ketimpangan akses jasa perbankan antar negara. Selain itu, beberapa negara yang memiliki kantor perbankan, rekening deposit, dan tingkat penggunaan perbankan yang cukup tinggi memiliki indeks keuangan inklusif lebih rendah dibandingkan dengan negara yang memiliki kantor perbankan, rekening deposit, dan tingkat penggunaan perbankan yang relatif lebih rendah. Berikut indeks keuangan inklusif berdasarkan negara di ASEAN.

TABEL 5.10

Indeks Keuangan Inklusi berdasarkan Negara di ASEAN Tahun 2008-2015

NEGARA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
INDONESIA	0.2312	0.2497	0.2664	0.2795	0.3079	0.3474	0.4637	0.4651	0.326
MALAYSIA	0.6458	0.6754	0.6732	0.6851	0.6997	0.7146	0.7092	0.7026	0.688
FILIPINA	0.2305	0.2346	0.2441	0.2507	0.2491	0.2669	0.2774	0.2875	0.255
THAILAND	0.4909	0.4956	0.498	0.4937	0.5209	0.5384	0.5518	0.6027	0.524
BRUNEI	0.6579	0.6669	0.6438	0.6356	0.6665	0.6847	0.6184	0.628	0.650
KAMBOJA	0.1103	0.1343	0.1452	0.128	0.1869	0.1964	0.2381	0.2636	0.175
SINGAPURA	0.6699	0.6806	0.6807	0.7043	0.7183	0.7301	0.7328	0.7255	0.705
MYANMAR	0.0461	0.0501	0.0546	0.058	0.0674	0.0937	0.1127	0.1202	0.075

Sumber : Data Diolah, 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai indeks keuangan inklusi yang tergolong tinggi (0,5-1) adalah Negara Singapura, Malaysia dan Brunei dengan nilai indeks masing-masing sebesar 0,705; 0,688 dan 0,650. Hal ini terjadi karena Negara Singapura, Malaysia dan Brunei unggul dalam dimensi pembentuk indeks inklusi keuangan. Tingkat inklusi keuangan di Singapura, Malaysia dan Brunei dari tahun ke tahun cenderung konstan. Hal ini dikarenakan faktor pembentuk

indeks inklusi keuangan, yaitu jumlah rekening deposit dan jumlah kantor cabang bank komersial, juga cenderung konstan.

Tingginya indeks inklusi keuangan di ketiga negara tersebut juga menunjukkan terdapat kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses jasa keuangan. Jasa perbankan telah menjangkau mayoritas masyarakat di ketiga negara tersebut. Baik Singapura, Malaysia maupun Brunei sudah mampu menghilangkan hambatan-hambatan dalam akses jasa keuangan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui pemanfaatan lembaga keuangan, khususnya perbankan. Meskipun relatif tinggi, terdapat perbedaan yang cukup besar antara indeks inklusi keuangan ketiga negara. Dengan demikian, berdasarkan nilai indeksnya, sistem keuangan di Singapura lebih inklusif dibandingkan dengan sistem keuangan di Malaysia dan Brunei. Artinya, akses jasa keuangan di Singapura lebih mudah dibandingkan dengan Malaysia dan Brunei.

Sedangkan untuk negara yang tergolong sedang (0,3-0,5) adalah Negara Thailand dan Indonesia. Meskipun tingkat inklusi keuangan di kedua negaramasih dalam golongan sedang, terdapat kecenderungan perbaikan dalam akses sektor perbankan setiap tahunnya. Usaha-usaha dalam menghilangkan hambatan akses jasa keuangan, seperti meningkatkan jumlah cabang bank, dilakukan sehingga masyarakat pedesaan pun dapat mengakses perbankan. Selain itu, untuk mendukung pengusaha kecil dan menengah, perbankan pun menyediakan kredit mikro sehingga usaha kecil dan menengah dapat bertahan dan

berkembang.kemudian, dengan berkembangnya perbankan dengan sistem syariah, hambatan dikarenakan agama dapat dikurangi.

Negara Filipina, Kamboja dan Myanmar termasuk dalam kategori rendah karena nilai indeks inklusi keuangan negara tersebut dibawah 0,3. Rendahnya indeks inklusi keuangan di ketiga negara tersebut menunjukkan akses terhadap jasa keuangan masih sulit.Masih terdapat hambatan bagi masyarakat untuk menjangkau jasa keuangan terutama perbankan.Selain karena jumlah perbankan yang belum memadai, produk perbankan yang ditawarkan juga belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Pendidikan yang masih rendah juga mengakibatkan kurangnya pemahaman terkait manfaat jasa keuangan.

Dengan dikeluarkannya program pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang target utamanya untuk memberantas kemiskinan, mengakibatkan semua negara ASEAN dituntut untuk meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat adalah dengan mempermudah layanan akses jasa perbankan. Semakin mudahnya layanan akses keuangan maka akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Semakin banyak masyarakat yang ikut andil dalam menggerakkan roda perekonomian maka semakin besar pula peluang negara untuk meningkatkan pendapatannya, dengan begitu tujuan utama SDGs untuk memberantas kemiskinan bisa dicapai.

2. Pengaruh Indeks Keuangan Inklusif terhadap Tingkat Kemiskinan dalam Pencapaian SDGs di ASEAN

Tujuan utama yang ingin dicapai SDGs adalah memberantas kemiskinan dalam segala bentuk. Setelah mendapatkan nilai indeks keuangan inklusif masing-masing negara di ASEAN, kemudian penulis menghubungkan dengan tingkat kemiskinan yang ada di masing-masing negara di ASEAN. Berikut hasil estimasi data :

TABEL 5.11

Hasil Estimasi Regresi Sederhana

Variabel Dependen : KEMISKINAN	Regresi Sederhana
Konstanta	28.39119
Standar error	1.209912
T-statistic	23.46550
Probabilitas	0.0000
IIK	-34.85046
Standar error	3.010283
T-statistic	-11.57714
Probabilitas	0.0000
R²	0.744487
F-Statistic	134.0301
Prob (F-Stat)	0.000000
Durbin-Watson Stat	0.354996

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dibuat suatu analisa mengenai pengaruh indeks inklusi keuangan terhadap kemiskinan dalam pencapaian SDGs di ASEAN yang diinterpretasikan bahwa indeks inklusi keuangan memiliki hubungan negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menandakan jika inklusi keuangan

semakin baik tingkat kemiskinan menurun karena adanya akses. Sehingga untuk mengurangi adanya kemiskinan perlu diadakan perbaikan dalam inklusi keuangan.

Kondisi ini yang diharapkan dalam pencapaian SDGs di ASEAN guna memberantas segala bentuk kemiskinan yang terjadi. Hal ini menandakan bahwa kestabilan system keuangan yang ada di masyarakat akan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, karena semakin terbukanya akses terhadap jasa keuangan diharapkan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran kredit oleh lembaga keuangan terutama apabila digunakan untuk kegiatan yang produktif.

TABEL 5.12

Tingkat Kemiskinan di ASEAN Tahun 2008-2015

NEGARA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
INDONESIA	15.4	14.2	13.3	12.5	11.7	11.4	11.3	11.2	12.6
MALAYSIA	3.8	3.8	3.8	3.8	1.7	1.4	0.6	0.4	2.40
FILIPINA	26.4	26.3	26.5	26.5	25.2	25.2	25.2	21.1	25.3
THAILAND	20.5	19.1	16.4	13.2	12.6	10.9	10.5	7.2	13.8
BRUNEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMBOJA	29.9	26.1	21.1	19.8	18.9	16	13.5	11.6	19.6
SINGAPURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MYANMAR	25.6	25.6	25.6	23.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.3

Sumber : ADB, 2008-2015

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat kemiskinan di Negara ASEAN, Brunei Darussalam dan Singapura tidak memiliki angka tingkat kemiskinan, karena negara Brunei dan Singapura sudah memiliki akses yang tinggi terhadap layanan

jasa keuangan, dibuktikan dengan angka yang tinggi di sebaran dimensi inklusi keuangan. Tingkat kemiskinan paling besar diduduki oleh negara Myanmar, didalam indeks keuangan inklusif Myanmar memiliki angka indeks keuangan yang paling rendah dibandingkan dengan negara lain. Tingkat kemiskinan yang tinggi juga dimiliki oleh negara Filipina, dalam indeks keuangan inklusi negara Filipina tepat berada sebelum negara Myanmar. Kemudian peringkat kemiskinan selanjutnya diduduki oleh negara Kamboja, Thailand dan Indonesia, namun dalam indeks inklusi keuangan Thailand dan Kamboja lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia meskipun Thailand dan Kamboja memiliki tingkat kemiskinan yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia, hal ini dikarenakan nilai dari ketiga dimensi keungan inklusif yaitu dimensi penetrasi, ketersediaan dan penggunaan Kamboja dan Thailand lebih besar dibandingkan dengan ketiga dimensi yang dimiliki oleh Indonesia. Tingkat kemiskinan paling sedikit dimiliki oleh negara Malaysia, hal ini sejalan dengan nilai indeks inklusi keuangan yang dimiliki oleh negara Malaysia yang lebih tinggi dibandingkan negara lain.

Inklusi keuangan memberikan keuntungan bagi masyarakat miskin dan juga usaha kecil dan menengah di ASEAN. Peranan paling penting adalah bahwa inklusi keuangan memfasilitasi transaksi keuangan untuk agen ekonomi baru (masyarakat miskin dan usaha kecil dan menengah) dalam jumlah yang besar. Ketersediaan layanan jasa keuangan membantu mereka untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang dapat meningkatkan

kualitas hidup masyarakat miskin. Inklusi keuangan membantu masyarakat miskin yang pada umumnya memiliki pendapatanyang kecil, dan tidak tetap bahkan musiman untuk mengurangi resiko keuangan melalui tabungan, kredit, asuransi yang rendah biaya dan berkelanjutan.

Sejalan dengan perannya pada masyarakat miskin, inklusi keuangan juga membantu pemilik usaha kecil dan menengah untuk dapat memanfaatkan kredit atau tabungan untuk mendapatkan investasi dalam bentuk aset yang produktif. Infrastruktur keuangan yang baik mendorong kemandirian dan membangun status ekonomi bagi masyarakat miskin dengan cara memberikan kemampuan bagi kelompok-kelompok yang selama ini “terpinggirkan” untuk ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, inklusi keuangan tidak hanya pro-pertumbuhan tetapi juga pro-kemiskinan karena akan menurunkan tingkat ketimpangan dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Peningkatan aksesibilitas terhadap layanan keuangan formal penting dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan di pedesaan terutama *off farm activities*, serta membangun jasa keuangan terutama lembaga keuangan mikro (*microfinance*) yang secara langsung mampu menyentuh aktivitas masyarakat pedesaan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara *financial deepening* dan perluasan jangkauan. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan mikro adalah dengan

memberikan pelayanan kepada usaha mikro kecil yang selama ini belum menikmati jasa pelayanan keuangan. Adanya pelayanan ini diharapkan akan memberikan dorongan bagi usaha mikro kecil untuk bisa meningkatkan kapasitas dan skala usahanya.

Rendahnya nilai indeks aksesibilitas mengindikasikan bahwa masyarakat miskin di ASEAN belum memiliki aksesibilitas yang baik terhadap layanan keuangan sektor formal. Hal ini dikarenakan sebagian besar bekerja di sektor informal dan memperoleh pendapatan yang tidak menentu. Pendapatan yang tidak menentu tersebut menjadi kendala bagi masyarakat miskin untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan formal. Bagi lembaga formal seperti Bank, pendapatan tetap dan pasti dari nasabah mereka menjadi jaminan bagi keberlangsungan usahanya, karena itu masyarakat miskin yang tidak mampu untuk memenuhi jaminan tersebut akan sulit untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan formal. Kondisi ini dikenal dengan *unbankable people*.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keuangan Inklusif dalam Pencapaian SDGs di ASEAN

Berdasarkan hasil penelitian atau estimasi model, maka dapat dibuat suatu analisa mengenai pengaruh variabel independen (Angka Melek Huruf, Jalan Aspal dan GDP Per capita) terhadap Keuangan Inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN yang diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Keuangan Inklusif

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat dijelaskan bahwa variabel Angka Melek Huruf berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif di ASEAN. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sarma (2012) yang menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf memiliki pengaruh positif terhadap keuangan inklusif.

Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan SDGs di ASEAN yang mulai berlaku akhir tahun 2015 menyebabkan tingkat pendidikan di ASEAN dituntut untuk semakin meningkat. Dengan begitu masyarakat lebih memiliki kapasitas yang lebih baik agar bisa ikut andil dalam program kebijakan SDGs. Semakin tinggi nilai kualitas pendidikan di suatu negara maka akan menghasilkan masyarakat yang semakin kompeten sehingga bisa menjadi motor penggerak dalam pembangunan perekonomian khususnya pembangunan berkelanjutan yang target utamanya adalah pengentasan kemiskinan. Dengan begitu tingginya nilai angka melek huruf akan berpengaruh positif terhadap pencapaian SDGs.

b. Pengaruh Infrastruktur Jalan Aspal terhadap Keuangan Inklusif

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat dijelaskan bahwa variabel Jalan Aspal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keuangan inklusif di ASEAN. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2015) yang menyatakan bahwa rasio panjang jalan tidak berpengaruh terhadap keuangan inklusif di Indonesia.

Hal ini dikarenakan berkembangnya produk baru yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dengan mengembangkan *Branchless Banking* seperti pengadaan ATM dan mesin setor tunai, pengadaan internet banking dan mobile banking. Kriteria *Branchless Banking* antara lain yaitu tanpa melalui kantor cabang bank, menggunakan agen yang bekerjasama dengan bank, nasabah bisa melakukan transaksi sendiri atau menggunakan agen, fitur transaksi yang sederhana (*basic feature*), layanan murah (*low cost transaction*) dan yang paling utama yaitu ditujukan khususnya untuk segmen bawah atau *unbanked poor*. Dengan demikian masyarakat tidak harus bersentuhan langsung dengan lembaga keuangan ketika melakukan transaksi.

c. Pengaruh GDP Per kapita terhadap Keuangan Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel GDP Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif di ASEAN. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2013) dan Sarma (2012) yang

menjelaskan bahwa GDP Per Kapita mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan.

Tingkat pendapatan dapat menjelaskan kondisi inklusi keuangan suatu negara. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita suatu negara, semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangannya. Negara yang berhasil mencapai tujuan pembangunan memiliki GDP per kapita yang tinggi. Kondisi infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan negara berpendapatan rendah, mendukung dalam peningkatan akses terhadap jasa keuangan. Pelayanan jasa keuangan di negara-negara *high income* pun lebih baik.

Tingginya pendapatan per kapita suatu negara menjadi tolok ukur untuk mencapai suatu pembangunan, dengan pendapatan yang tinggi berarti masyarakat memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi. Pendapatan per kapita yang ada di ASEAN masih mengalami fluktuasi, ini menjadi tantangan untuk negara ASEAN untuk bisa mempertahankan pendapatan per kapita nya agar selalu dalam tren yang naik, dengan begitu target SDGs untuk memberantas kemiskinan yang masih ada di ASEAN akan bisa dicapai karena tingginya pendapatan perkapita mencerminkan kemakmuran suatu negara.